

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan. Dalam kehidupan sosial masih muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai akibat belum stabilnya kondisi ekonomi yang mengakibatkan anak rawan dan putus sekolah, perkembangan budaya dan teknologi yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Di sisi lain peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat daya tampung siswa saat ini masih belum memenuhi akan kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar.

Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Di lain pihak kemampuan tenaga pendidik untuk mengembangkan diri secara profesional melalui pelatihan-pelatihan masih perlu ditingkatkan. Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metoda pembelajaran, dan murid.

a. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan adalah:

- 1) Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah;
- 2) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;
- 3) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;

- 4) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.

b. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah:

- 1) Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan belum berkembang pada semua sekolah;
- 2) Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran;
- 3) Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram.

c. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

- 1) Kurangnya sekolah dalam mewadahi siswa yang berprestasi;
- 2) Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal;
- 3) Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
- 4) Lulusan sekolah kurang memiliki keterampilan dan kecakapan hidup;
- 5) Belum Optimalnya kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

d. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Efisiensi pendidikan adalah :

- 1) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah,
- 2) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru,
- 3) Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah.
- 4) Pengembangan inovasi dalam memenuhi kebutuhan perkembangan siswa terdapat permasalahan seperti:
 - a. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini disebabkan karena:
 - Belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
 - Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawas;
 - Belum optimalnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer;
 - Kurangnya dukungan dana operasional untuk pendataan.
 - b. Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif;
- 5) Standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi kegiatan dan evaluasi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Visi Walikota Depok terpilih seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021

adalah **“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”** dengan penjabaran sebagai berikut:

- Unggul** : menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, pengembangan ekonomi yang kokoh dan berkeadilan berbasis industri kreatif dan pengembangan sumber daya manusia yang bertumpu pada ketahanan keluarga.
- Nyaman** : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan dan ramah bagi kehidupan masyarakat.
- Religius** : terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan agama bagi masing-masing pemeluknya, yang tercermin dalam peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan misi guna mencapai visi itu, sehingga diharapkan agar seluruh anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi lebih baik serta mendorong keberhasilannya. Adapun Misi Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumberdaya manusia yang religius, kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan berbasis industri kreatif.
4. Membangun infrastruktur dan ruang public yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam nilai-nilai agama dan

menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Disamping visi dan misi tersebut di atas, terdapat 10 program unggulan yang merupakan janji Walikota/Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye pemilihan kepala daerah, yaitu:

1. Program Depok peduli pendidikan (subsidi siswa miskin dan kesejahteraan guru honorer);
2. Pelayanan Puskesmas rawat inap 24 jam di setiap kecamatan dan pembangunan RSUD wilayah timur;
3. Pembangunan taman terpadu di setiap kelurahan (Taman Edukasi, rekreasi, perpustakaan, arena bermain untuk anak dan lansia, jogging track dan sarana olah raga, konservasi lingkungan disekitarnya);
4. Pembangunan pusat kreasi rakyat dan panggung budaya kreatif;
5. Revitalisasi pasar tradisional yang bersih dan nyaman dan penyediaan 1000 kios UMKM;
6. Pembangunan sentra industry kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer);
7. Peningkatan insentif RT, RW dan LPM;
8. Peningkatan dana operasional bagi kader posyandu dan posbindu;
9. Pemberian dana insentif bagi pembimbing rohani;
10. Pembangunan alun-alun kota.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih

menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pendidikan Nasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
2. Mewujudkan Akses yang Meluas dan Merata;
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Program Nasional bidang Pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat antara lain:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
- 3) Program Pendidikan Menengah;
- 4) Program Pendidikan Luar Biasa;
- 5) Program Pendidikan Non Formal;
- 6) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;



- 8) Program Pendidikan Tinggi; dan
- 9) Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.

Program–Program Prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Peningkatan Akses dan daya saing Pendidikan Tinggi;
2. Peningkatan Akses dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Vokasi;
3. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang Bermutu;
5. Peningkatan Akses dan Mutu PAUD.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Depok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 bahwa kebijakan penataan ruang wilayah Kota Depok terdiri atas:

1. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota, yang meliputi:

- a. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, perdagangan dan jasa berskala regional;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis;
- c. pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan, riset dan inovasi teknologi, serta perdagangan dan jasa.

2. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota, yang meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Untuk kawasan budidaya ini

meliputi: kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal dan kawasan peruntukan lainnya.

Salah satu dari kawasan peruntukan lainnya tersebut merupakan pelayanan umum, dimana di dalamnya terdapat fasilitas pendidikan yang meliputi :

- a. Pendidikan dasar tersebar di Kota Depok;
- b. Pendidikan menengah tersebar di Kota Depok;
- c. Pendidikan tinggi terdapat di Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Pasir Gunung Selatan dan Kelurahan Limo;
- d. Pendidikan luar sekolah tersebar di Kota Depok.

Adapun rencana fasilitas pendidikan ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan prasarana dan sarana;
- b. pembangunan fasilitas pendidikan baru tingkat dasar hingga menengah dilakukan tersebar pada lokasi fasilitas umum sekitar kawasan permukiman sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya;
- c. pengembangan fasilitas pendidikan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan SNADA di Kelurahan Cipayung Jaya;
- d. melakukan relokasi dan penggabungan secara bertahap terhadap fasilitas pendidikan yang tidak memenuhi syarat teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
- e. penyediaan fasilitas parkir yang memadai pada fasilitas pendidikan sesuai dengan ketentuan berlaku.

3. Kebijakan Penetapan Kawasan Strategis Kota, yang meliputi pengembangan kawasan strategis kota melalui penetapan kawasan



strategis dari sudut pandang ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada pendidikan di Kota Depok antara lain:

- Tantangan di masa 5-10 tahun ke depan adalah jumlah anak usia pendidikan dasar menengah akan meningkat. Namun demikian data dan informasi anak-anak usia wajib belajar yang tidak sekolah belum terjangkau dengan baik;
- Penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum berjalan mantap dan sesuai harapan, disisi lain adanya alih kelola kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ke propinsi;
- Pergerakan anak bersekolah yang lintas wilayah, sehingga beban pelayanan pendidikan tidak seimbang.
- Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan;
- Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang;
- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya masing-masing daerah;

- Rendahnya kompetensi tenaga pendidik yang masih dibawah standar;
- Belum optimalnya pemanfaatan IT;
- Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya;
- Masih ada pelayanan lembaga pendidikan yang belum sesuai dengan standar nasional;
- Belum optimalnya tata kelola sekolah menyangkut alokasi DAK untuk ruang kelas baru, dana BOS, DSP/SPP;
- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran lembaga pendidikan masih rendah;
- Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;
- Pelaksanaan MBS belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007;
- Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan belum optimal;
- Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;
- Orientasi masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri sehingga melebihi daya tampung dan kekurangan ruang kelas baru pada jenjang SMP dan SMA;
- Masih fluktuatifnya jumlah angka putus sekolah baik ditingkat SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA;
- Berdasarkan capaian sasaran APM/APK semua jenjang dari Tahun 2011- 2015 masih menunjukkan trend yang tetap fluktuatif. Maka perlu dilakukan upaya sistematis untuk meningkatkan RLS dan AMH.